

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan data temuan penelitian yang telah dianalisis dan dibahas pada Bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat memberikan simpulan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada awal tulisan. Simpulan hasil penelitian tentang apa yang terjadi dan bagaimana tindak lanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran Praktik di Akademi Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik di Akademi Pariwisata NHI Bandung dan di Akademi Pariwisata Nusantara Jaya Depok diukur melalui empat dimensi fungsi produksi pendidikan (*education production function*) yakni *context, input, process, output dan outcomes*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran praktik belum terlaksana secara optimal. Pada aspek *context* pelaksanaan pembelajaran praktik di kedua AKPAR tersebut belum secara jelas menyatakan target mutu pembelajaran praktik, sedangkan kebijakan perguruan tinggi dalam merencanakan mutu tidak dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat disosialisasikan kepada civitas akademika. Pengelolaan mutu belum disadari dan dikelola dengan baik oleh seluruh unit yang ada, cenderung masih melimpahkan tanggung jawabnya kepada SPMI saja. Struktur pelaksana kegiatan mutu belum dijalankan secara optimal, terkesan asal ada saja. Pelaksanaan Manajemen mutu masih sebatas pekerjaan administrasi yang bersifat rutinitas belum melekat menjadi budaya mutu sebagaimana fungsi manajemen mutu, yaitu untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. Melaksanakan apa yang direncanakan, mengawasi dan melakukan menindaklanjuti perbaikan mutu.

Ketercapaian pelaksanaan pembelajaran praktik yang dilihat dari aspek *input* pembelajaran, menunjukkan bahwa Kurikulum yang digunakan di kedua AKPAR masih menggunakan kurikulum lama yang dalam penyusunannya masih belum melibatkan pihak industri, sehingga informasi terkini atau tren yang sedang terjadi di industri tidak muncul (*update*) dalam kurikulum sebagai capaian

pembelajaran. Selain masalah kurikulum, temuan lainnya adalah masih belum adanya SOP dan RPS dalam bentuk tertulis sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran praktik. Kualifikasi dosen pembelajaran praktik belum semua memiliki pengalaman kerja industri. Selain itu input peserta didik yang mendaftar kecenderungannya berasal dari lulusan SMA bukan SMK. Teknologi alat pembelajaran praktik yang digunakan tidak *update* dengan alat yang digunakan di industri. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran praktik masih belum sesuai dengan standar Industri.

Pada aspek *process* pembelajaran praktik, diketahui bahwa komposisi waktu yang digunakan untuk pembelajaran praktik sudah cukup untuk Akpar NHI Bandung, namun masih kurang untuk Akpar Nusantara Jaya Depok. Pelaksanaan pembelajaran praktik berjalan sebatas rutinitas bukan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, pembelajaran diserahkan seutuhnya kepada para dosen pengampu mata kuliah, sehingga media, bahan ajar, dan teknik tergantung pada kehendak para dosennya. Kegiatan teknis belum terkoordinasikan secara baik dikarenakan belum adanya SOP yang menjadi panduan pelaksanaan. Belum ada RPS pembelajaran praktik yang dibuat dosen sebelum memulai pembelajaran.

Adapun pada aspek *output* pembelajaran praktik, diketahui bahwa capaian pembelajaran tidak diukur pada setiap sesi belajar tetapi dilaksanakan sekaligus pada saat akhir semester. Sedangkan perubahan sikap dan peningkatan kompetensi mahasiswa setelah belajar yang menjadi tolak ukur dari *output* pembelajaran praktik tidak dicatat secara tertulis individual tetapi dilihat dari gambaran kemampuan unjuk kerjanya secara kelompok. Pada akhir kegiatan pembelajaran praktik, mahasiswa melakukan unjuk kerja secara kelompok bukan individual. Capaian pembelajaran praktik masih belum optimal karena terbatasnya waktu dan peralatan yang digunakan ketika pembelajaran praktik.

Selanjutnya, pada aspek *outcome* pembelajaran praktik tergambar bahwa kemampuan unjuk kerja mahasiswa masih belum optimal sesuai standar karena masih adanya keluhan dari industri perhotelan tentang beberapa mahasiswa PKL yang belum siap kerja tetapi baru siap *training*, sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian dan pembinaan dari industri. Data lain terkait *outcome* pembelajaran praktik adalah data hasil *Tracer Studi* yang menunjukkan bahwa

Deden Saepudin, (2023)

**MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

sebaran lulusan didominasi bekerja di industri pariwisata, khususnya perhotelan akan tetapi kebanyakan mereka bekerja pada tingkat pelaksana, posisi yang sama dengan lulusan SMK.

## 2. Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Praktik

.Gambaran implementasi manajemen mutu Pembelajaran Praktik di Akademi Pariwisata NHI Bandung dan di Akademi Pariwisata Nusantara Jaya Depok diperoleh melalui model manajemen mutu dari Edward Demming, yaitu *plan-do-check-action*. yang dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, temuan penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan (*plan*) kegiatan pembelajaran praktik masih bersifat rutinitas tahunan yang turun temurun, tidak didukung dengan hasil evaluasi dan analisis kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan mutu pembelajaran praktik, tidak dirumuskan bersama dengan para dosen pengampu dan masukan pihak eksternal, yaitu industri dan para lulusan. Belum ada dokumen mutu secara tertulis yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan, seperti Kurikulum SOP, manual mutu khusus tentang pembelajara praktik sehingga dalam pelaksanaan dosen masih kesulitan dalam mengevaluasinya. Kebijakan dan perencanaan mutu tidak disosialisaikan kepada pihak pihak terkait, hanya sebatas menjadi dokumen SPMI

Dimensi kedua, yaitu pelaksanaan (*do*) manajemen mutu pembelajaran praktik pada kedua Akpar dapat disimpulkan masih belum sesuai dengan perencanaan, dimana pelaksanaan pembelajaran praktik masih tergantung kepada Dosen/Instruktur pengampu mata kuliah praktik. Mekanisme pembelajaran praktik masih berubah-ubah karena tidak adanya SOP yang dipersiapkan. Adapun penerapan standar mutu belum menjadi komitmen semua pihak, karena masih bersifat administratif untuk kepentingan dokumen SPMI. Selain itu faktor keterbatasan fasilitas pembelajaran praktik dan belum adanya keterlibatan pihak eksternal (industri) dalam pelaksanaan pembelajaran praktik menjadi alasan lain yang membuat raihan capaian pembelajaran belum optimal..

Dimensi ketiga, yaitu pengawasan dan evaluasi (*check*) manajemen mutu pembelajaran praktik ini di Akpar NHI Bandung dan Akpar Nusatara Jaya Depok dapat disimpulkan masih belum optimal karena belum adanya pihak yang

Deden Saepudin, (2023)

**MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

bertugas khusus menangani dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Praktik ini. Belum terbentuk Struktur organisasi pelaksana pengawasan mutu pembelajaran, seperti Gugus Kendali Mutu (GKM), Pengawasan masih bersifat kasuistik, belum menjadi komitmen semua unsur terkait pembelajaran praktik. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pembelajaran praktik seringkali hanya mengandalkan mahasiswa senior, kurang pendampingan dosen. Dengan kata lain dosen tidak mengawasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran praktik.

Dimensi keempat, yaitu tindak lanjut perbaikan dan pengembangan (*action*) dapat disimpulkan belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu pembelajaran yang disajikan dalam bentuk dokumen tertulis. Mekanisme evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi mutu pembelajaran saat ini tidak dalam bentuk dokumen tertulis tetapi hanya bersifat laporan lisan kepada Direktur. Belum adanya tim yang bertugas menindaklanjuti setiap kendala dan temuan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran praktik.

### 3. Model Hipotetik Manajemen Mutu Pembelajaran Praktik

Model manajemen mutu pembelajaran praktik pada perguruan tinggi vokasi bidang Pariwisata disusun berdasarkan hasil analisis secara mendalam yang menunjukkan bahwa keterlibatan industri menjadi indikator penting yang sering muncul dalam setiap analisis hasil data di lapangan terhadap setiap indikator atau dimensi yang diteliti. Desain model manajemen mutu pembelajaran praktik yang mengedepankan kompetensi sebagai “*learning outcomes*” atau capaian pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri yang disebut dengan BERKONGSI, akronim dari berbasis “kompetensi terintegrasi industri” ini menjadi model yang telah melewati beberapa tahapan dalam proses perancangan dan uji coba hingga pengembangan model yang ajeg.

Model manajemen mutu pembelajaran praktik berbasis kompetensi terintegrasi industri di perguruan tinggi vokasi bidang pariwisata ini disusun berdasarkan asumsi tentang pentingnya kolaborasi dan pengorganisasian bentuk kolaborasi antara Perguruan Tinggi vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (IDUKA) dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran praktik.

Kesadaran terhadap realitas fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa

Deden Saepudin, (2023)

**MANAJEMEN MUTU TERPADU PEMBELAJARAN PRAKTIK DI PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

pendidikan vokasi yang dituntut menghasilkan lulusan bermutu, yaitu yang memiliki kompetensi sesuai standar dan kebutuhan industri ternyata bukanlah pekerjaan mudah dan murah. Keterbatasan SDM dan biaya merupakan salah satu kendala yang acapkali dialami banyak perguruan Tinggi vokasi, khususnya swasta. Keterbatasan itulah yang menyebabkan tidak optimalnya proses pembelajaran praktik. Jumlah waktu belajar yang kurang memadai, fasilitas praktik yang tidak standar, dosen/instruktur praktik yang kurang *update* perkembangan industri, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas lulusan karena tidak memiliki kompetensi yang seharusnya. Pada kondisi inilah dibutuhkan suatu pemikiran dalam bentuk manajemen mutu pembelajaran praktik yang menggandeng industri menjadi mitra sebagai solusinya.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran praktik, implementasi manajemen mutu pembelajaran praktik, dan Model hipotetik manajemen mutu pembelajaran praktik yang dapat diterapkan di Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata. Ketiga hasil penelitian ini memunculkan implikasi terhadap sejumlah hal lain terkait pembelajaran praktik, diantaranya:

1. Perlunya melakukan kerjasama saling menguntungkan atau kemitraan antara Perguruan Tinggi Vokasi Pariwisata dengan Industri dan dunia kerja (IDUKA) yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoU) tentang pelaksanaan pembelajaran praktik. Hal ini penting dilakukan supaya pihak Perguruan Tinggi mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembelajaran praktik, misalnya SDM, informasi terkini tentang teknologi yang dipakai industri, tren perkembangan pariwisata terkini, dan hal penting lainnya untuk bahan ajar bagi dosen dan para mahasiswanya.
2. Perlunya melibatkan pihak industri dalam penyusunan kurikulum pembelajaran praktik. Informasi yang diberikan pihak industri saat penyusunan kurikulum akan diperlukan untuk menentukan profil lulusan, kompetensi yang dibutuhkan di industri, jenis dan teknologi peralatan praktik yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dengan keterlibatan pihak industri

dalam penyusunan kurikulum, maka diharapkan akan muncul pembelajaran yang *link & match* antara kampus dan Industri sebagai ciri khas pendidikan vokasi khususnya bidang Pariwisata.

3. Perlunya internalisasi Manajemen mutu pembelajaran praktik yang tertuang dalam Model Hipotetik BERKONGSI ini kepada seluruh Civitas Akademika melalui kebijakan Pimpinan Perguruan Tinggi supaya bisa menjadi budaya mutu dalam melakukan perbaikan mutu pembelajaran praktik secara berkelanjutan.
4. Menerbitkan regulasi tentang implementasi Model Hipotetik BERKONGSI” perlu melibatkan pihak internal, yaitu Yayasan penyelenggara pendidikan dan pihak eksternal, diantaranya Asosiasi lembaga penyelenggara pendidikan vokasi, misalnya HILDIKTIPARI, Asosiasi Pengusaha, Misal PHRI, serta Asosiasi Profesi, misalnya ICA Indonesia (Chef Association) dan IHGMA (Indonesia General Manager Hotel Association).
5. Perlunya dokumen mutu secara tertulis sebagai aturan baku yang dapat dijadikan pedoman, sehingga pelaksanaan pembelajaran praktik supaya mekanisme pembelajaran praktik tidak berubah-ubah.
6. Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan manajemen mutu PDCA, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini penting untuk menghindari pembelajaran praktik yang bersifat rutinitas tahunan yang turun temurun, tidak didukung dengan hasil evaluasi dan analisis kegiatan tahun sebelumnya.

### 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian yang telah diuraikan di atas, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu :

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian yang telah diuraikan di atas, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Melakukan upaya serius untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan atau kemitraan/kolaborasi dengan Industri dan dunia kerja (IDUKA) yang

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (MoU) tentang pelaksanaan pembelajaran praktik.

2. Menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai Asosiasi lembaga penyelenggara pendidikan vokasi, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Profesi untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan kerja sama dengan industri dan dunia kerja IDUKA dalam pengelolaan pembelajaran praktik.
3. Selalu mengevaluasi dan mengembangkan Kurikulum yang adaptif dan dinamis terhadap tren perkembangan industri dan dunia kerja.
4. Melengkapi dokumen tertulis terkait kegiatan pembelajaran praktik, misalnya RPS, SOP, dll., sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perbaikan mutu berkelanjutan.
5. Berupaya menciptakan kegiatan yang bisa menghadirkan mahasiswa di industri untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman kerja, tidak hanya dalam bentuk PK saja.
6. Berupaya melengkapi fasilitas pembelajaran praktik yang lebih mencukupi dan *uptodate* sesuai dengan perkembangan tren pariwisata dan sesuai dengan yang digunakan oleh IDUKA. Lebih jauh lagi bisa dalam bentuk *Teaching Factory (tefa)* atau *Teaching Industry*.
7. Menjadikan manajemen mutu PDCA sebagai budaya yang terinternalisasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan di perguruan tinggi termasuk dalam pembelajaran praktik sehingga setiap kegiatan ada dokumen dan SOP nya, pelaksanaan pembelajaran sesuai SOP, evaluasi dilakukan dengan jelas dan terukur, tindak lanjut dilakukan atas hasil evaluasi.